

**EFEKTIVITAS PENDAPATN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH  
TERHADAP RETRIBUSI DAERAH YANG DI KELOLA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Oleh

Hedi Afandi Ritonga<sup>1</sup>, Juliana Nasution<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1</sup>[hediafandi6@gmail.com](mailto:hediafandi6@gmail.com), <sup>2</sup>[juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

**Abstrak**

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data berupa dokumen berupa laporan kinerja pendapatan dan belanja APBD Kota Medan periode 2021 yang diperoleh dari Kota Medan Otoritas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memperoleh data berupa anggaran dan melaksanakan pendapatan daerah dan pendapatan awal kota. Data tersebut kemudian diolah untuk mengetahui seberapa penting efektivitas dan kontribusi Retribusi Kota Medan dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Medan.

**Kata Kunci:** *Efektifitas, Aset Derah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Pajak*

**PENDAHULUAN**

Suatu Otonomi memiliki pembiayaan suatu daerah yang telah membuat keputusan yang lebih efektif dalam daerahnya guna memanfaatkan potensi dan kepentingan daerah serta mengelola sendiri sumber daya. Sumber daya alam pada akhirnya akan habis, sehingga kesalahan menjadikan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama daerah harus segera diubah. Pemerintah daerah perlumulai mencari sumber pendapatan lain diN daerahnya untuk menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD). Diperlukan modal yang cukup untuk mencapai otonomi daerah yang optimal.

Pekerjaan pembangunan saat ini sedang berlangsung ke tahap nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, sejalan dengan falsafah nasional Indonesia “memajukan kemakmuran bersama” yang tertuang dalam UUD 1945. Pada saat yang sama, pengembangan masyarakat itu sendiri, diperlukan agar dapat mengelola potensi masyarakat bersama-sama dengan masyarakat, mendorong pembangunan

ekonomi dan menciptakan lapanganNkerja baru di masyarakat.

Penerimaan dalam daerah penerimaan dari pajak daerah, pajak daerah hasil saha daerah hasil pengelolaan tersendiri atas kekayaan daerah, dan penerimaan dari usaha daerah pemerintah daerah yang sah. Pendapatan Pokok Daerah (RBI) adalah pendapatan pemerintah daerah dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pasal 1, 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah, „pendapatan daerah untuk membayar jasa atau memberikan izin tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau khusus untuk kepentingan, „suatu daerah orang perseorangan atau badan hukum. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan mendorong penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (DPA).

Efisiensi adalah hubungan antara keluaran dan tujuan atau dapat juga dipandang

sebagai ukuran tingkat keluaran, kebijakan dan prosedur organisasi Efisiensi juga berkaitan dengan seberapa berhasil suatu kegiatan di sektor publik sedemikian rupa sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan penyampaian pelayanan publik yang ditargetkan sebelumnya Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah Efisiensi adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu atas jasa yang diberikannya Menurut Sondang (2016: 24) Efektivitas merepresentasikan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan, semakin tinggi efisiensinya Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elfayang dan Abdul (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah sudah efisien dan efektif dalam peningkatannya, hal ini disebabkan karena biaya pungutan yang rendah karena pajak daerah yang berkurang turun dibawah target pajak daerah sehingga upah tidak datang keluar, karena uang pajak adalah semacam hadiah Demikian pula Kota Palembang yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan juga diberdayakan untuk mengatur dan mengelola sendiri aliran pendapatan daerahnya Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di kota Palembang diharapkan kota mampu meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan awal daerah

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif memiliki banyak arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tiga arti akibat, arti pertama adalah adanya akibat, akibat, pengaruh dan kesan Indera kedua efektif atau efisien dan indra ketiga dapat mendatangkan akibat atau akibat Kata efektif berasal dari kata effect yang

berarti pengaruh atau pengaruh dan kata efektif berarti pengaruh atau pengaruh suatu unsur Jadi, akibat adalah akibat atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu 15 Menurut John Amerika Serikat Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Anglo-Indonesia secara etimologi efektif berarti efektif Dalam kamus khas bahasa Indonesia, efektivitas adalah penjelasan yang berarti hasil suatu tugas atau ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan Dapat dipahami bahwa efektivitas juga berarti menunjukkan derajat pencapaian tujuan Usaha mencapai tujuan

### 2. Pengertian Pendapatan Hasil Daerah

Penerimaan pokok daerah adalah penerimaan yang bersumber dari penerimaan daerah dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung keuangan daerah, sehingga kemampuan berjalan perekonomian diukur dari besar kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PDBA, ditambah lagi dapat dilakukan untuk sumber pendapatan daerah untuk APBD, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah atas dukungan pemerintah daerah

### 3. Pengertian Retribusi Daerah

Biaya penggunaan, dalam bentuk kompensasi, secara harfiah adalah pendapatan moneter dari pemerintah daerah seperti kota, kabupaten, dan negara bagian Konon, royalti sebenarnya sumber pendanaan yang berbeda untuk daerah dari pajak daerah Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembalasan adalah pajak daerah yang memperhitungkan pemberian jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum kesatuan

Retribusi atau retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berguna untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan usaha Beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa biaya penggunaan sama dengan pajak lokal Meski sebenarnya kedua hal ini tidak sepenuhnya salah, namun tetap memiliki perbedaan masing-masing Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah Selain itu, keduanya berkewajiban menanggung biaya masyarakat Jika masyarakat setuju untuk membayar keduanya, itu akan menciptakan kemakmuran bersama

## Metodologi Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl Sisimangaraja km 5,5 Amplas Medan, Provinsi Sumatera Utara Waktu magang di laksanakan pada tanggal 17 Januari sampai 17 Febuari

### 2 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif Data kualitatif adalah data yang mewakili kualitas seperti hasil wawancara Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: Data kunci Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Otoritas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Medan Metode pengumpulan data ini dilakukan dari wawancara tatap muka di lokasi penelitian Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data dokumenter yaitu laporan kinerja pendapatan dan belanja daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Retribusi Daerah Kota Medan

## Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data berupa dokumen berupa laporan kinerja pendapatan dan belanja APBD Kota Medan periode 2021 yang diperoleh dari Kota Medan Otoritas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memperoleh data berupa anggaran dan

melaksanakan pendapatan daerah dan pendapatan awal kota Data tersebut kemudian diolah untuk mengetahui seberapa penting efektivitas dan kontribusi Retribusi Kota Medan dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Medan Selain data kepustakaan, data berupa wawancara yang dilakukan penulis pada Badan Pengelola Kekayaan Daerah Kota Medan, guna mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor penyebab inefisiensi dan kontribusi pendapatan daerah dalam kota Medan

**Tabel 1 3**

Data Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kode	Uraian	Realisasi 2021	%	Usul P.APBD	Prognosis TA. 2022
08	Dinas Lingkungan Hidup	1.645.737.000	123,41	0	0
4.1.2	Retribusi Daerah	1.645.737.000	123,41	0	0
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.645.737.000	123,41	0	0

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Beni Pekei 20160 Konsep dan analisis efektif pengelolaan keuangan daerah di era otonomi Jakarta Pusat
- [2] Taushia Ahmad Yani (2011) Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia Jakarta: PT Raja Garfindo Persada
- [3] Anton Trianto (2016) Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kota Palembang Jurnal Akuntansi Online ISSN 24772984, halaman 112
- [4] Bobby Fandhi Putra, Dwi Atmanto dan Nila Firdaus Nuzula (2014) Menganalisis kinerja penerimaan dan kontribusi penerimaan daerah terhadap pendapatan pokok daerah (penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Jilid 10 No 1, hal 19
- [5] Boediono (2016) Ekonomi moneter Yogyakarta: BPFE
- [6] Dandy Ahmad Drajat (2017) Efisiensi dan kontribusi Retribusi Jasa Pasar

terhadap pendapatan pembayaran utang menurut daerah di Kabupaten Berau  
Economics Brings The Basics All About  
Development Magazine Vol 1, Issue 2, p  
111